



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 27 Maret 2023
Waktu	: pukul 14.00 WIB – 17.10 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Pengawasan dalam Penyusunan Rencana Strategis BPKH Tahun 2022-2027; 2. Isu-isu Aktual.
Ketua Rapat	: Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si.
Hadir	: 1. 29 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Ketua Dewan Pengawas BPKH (Firmansyah N. Nazaroedin); 3. Anggota Dewan Pengawas BPKH (Deni Suardini); 4. Anggota Dewan Pengawas BPKH (Heru Muara Sidik); 5. Anggota Dewan Pengawas BPKH (M. Dawud Arif Khan); 6. Anggota Dewan Pengawas BPKH (Mulyadi); 7. Anggota Dewan Pengawas BPKH (Rojikin); 8. Anggota Dewan Pengawas BPKH (Ishfah Abidal Aziz); 9. Jajaran Dewan Pengawas BPKH.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 15.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si., dengan didampingi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengenai **“Pengawasan dalam Penyusunan Rencana Strategis BPKH Tahun 2022-2027 dan isu-isu aktual lainnya”** disimpulkan:

1. Komisi VIII DPR RI meminta Dewan Pengawas BPKH untuk menyampaikan penilaian atas rumusan kebijakan, rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji di dalam rencana strategis BPKH tahun 2022-2027 serta menyampaikannya kepada Komisi VIII DPR RI sebagai bahan pengawasan.
2. Komisi VIII DPR RI meminta kepada Dewan Pengawas BPKH untuk menyerahkan hasil kajian penyusunan analisa beban kerja struktur organisasi dan tata kerja, perhitungan *unit cost* per jemaah, perhitungan kewajiban jangka panjang, dan penyederhanaan regulasi internal BPKH.
3. Dalam rangka meningkatkan kualitas Pengawasan Pengelolaan Keuangan Haji, Komisi VIII DPR RI meminta Ketua Dewan Pengawas BPKH untuk menindaklanjuti pandangan serta pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan peran Dewan Pengawas BPKH dalam penyusunan rencana strategis BPKH tahun 2022-2027;
 - b. Melakukan reviu terhadap data-data yang ada dalam rencana strategis BPKH tahun 2022-2027;
 - c. Mendorong transparansi kinerja dan bisnis proses keberlanjutan pengelolaan keuangan haji BPKH.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.10 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si.